

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny Septriadi, Khisi Armaya Dhora. 2018. *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : Publikasi E-Books DDTC.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Ditjen Pajak Sambut Integrasi Data Perpajakan PT PLN*. <https://www.pajak.go.id/berita/ditjen-pajak-sambut-integrasi-data-perpajakan-pt-pln>.
- Indrayani, Ni Made Meisintia, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol 4 No. 2 Tahun 2022.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2018. *Tentang Penetapan PT PLN (Persero) sebagai Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Aplikasi e-Faktur Host-To-Host (H2H)*.
- Lintang, Kevin, Lintje Kalang, Rudy Pusung. *Analisis Penerapan e-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 5 No. 2 Tahun 2017.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. *Tentang Faktur Pajak*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022. *Tentang Perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012. *Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972. *Tentang Perusahaan Umum “Listrik Negara”.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994. *Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005. *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015. *Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021. *Tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010. *Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.*
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priatna, Asep, Riri Rumaizha. *Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN*

pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol.8 No.2 Tahun 2022.

Rahayu, Siti Kurnia, E Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta : Penerbit Indeks Jakarta.

Satori, Djama'an, Aan Komariah. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Simatupang, Novita Sari. *Analisis Penerapan e-Faktur dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Polobnia* (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019).

Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009. *Tentang Ketenagalistrikan.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

Wahasumiah, Rolia. *Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN.* Jurnal Riset Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Vol. 3 No. 3 Tahun 2022.